

Tinjauan Buku:

Fenomena Bangkitnya Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata Bali

I Made Sarjana

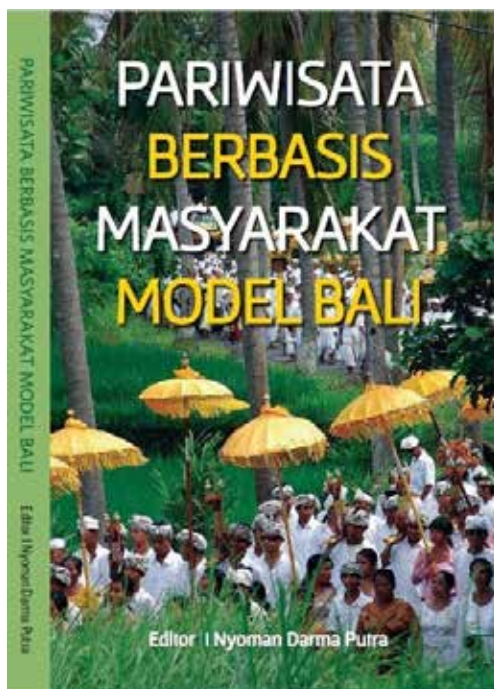
Universitas Udayana

Email: madesarjana@unud.ac.id

Judul : Pariwisata Berbasis Masyarakat Model Bali
Editor : I Nyoman Darma Putra
Penerbit : PS Magister Kajian Pariwisata Unud-Buku Arti
Tempat Terbit : Denpasar
Tahun Terbit : Cetakan Pertama, Desember 2015
Ukuran : 20,5 x 14 cm
Jumlah Halaman : 207+XXVII
ISBN : 978-602-6896-05-6
Harga : Rp. 60.000

Buku bertajuk *Pariwisata Berbasis Masyarakat Model Bali* diterbitkan pengelola Program Studi Magister Kajian Pariwisata Universitas Udayana sebagai kado ulang tahun ke-15 lembaga pendidikan strata 2 tersebut pada tahun 2016 ini. I Nyoman Darma Putra selaku Ketua Magister Kajian Pariwisata sekaligus editor buku secara singkat menyebutkan tujuan penerbitan buku ini adalah sebagai ucapan “terima kasih kami kepada pengetahuan yang dikembangkan oleh almamater”. Tujuannya memang sederhana, namun makna yang terkandung di dalamnya tentu bisa dibedah dalam banyak interpretasi.

Pertama, buku ini menggambarkan proses pergulatan pemikiran para dosen dan mahasiswa yang



kuliah dan mengajar di Prodi Magister S-2 Kajian Pariwisata tersebut dalam mencari jatidiri keilmuan. Kedua, pemilihan tema pariwisata kerakyatan juga akan menjadi upaya Magister Kajian Pariwisata untuk meyakinkan publik bahwa lulusannya punya kompetensi dan kepedulian tinggi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat/komunitas yang seluas-luasnya. Jadi, sasaran pembaca buku ini segala lapisan masyarakat yang punya ketertarikan yang tinggi terhadap partisipasi masyarakat dalam merencanakan, mengelola, dan melakukan kontrol sosial dalam pembangunan pariwisata.

Berpijak pada penjelasan Fersari (2011) bahwa secara umum ada empat prinsip dasar pengembangan pariwisata berkelanjutan yakni keterlibatan komunitas, pemanfaatan sumberdaya lokal secara berkelanjutan, adanya perencanaan dalam pengembangan pariwisata serta penyediaan informasi dan penelitian. Terkait keterlibatan masyarakat, dari sejumlah kasus yang dikaji dalam buku tersebut, ada benang merah atau kesamaan pola pengembangan yakni pengembangan PBM di Bali didahului dengan perjuangan panjang dan berliku masing-masing komunitas (baca: desa adat) untuk terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan destinasi wisata di wilayah masing-masing. Inisiatif atau pelibatan desa adat tersebut menjadi ciri khas pengembangan PBM model Bali, inilah fokus utama para civitas akademika Magister Kajian Pariwisata yang terlibat penulisan buku ini.

Ibarat kata sekali mengayuh dayung dua tiga pulau terlampaui, penerbitan buku ini dapat mewujudkan harapan pengelola Magister Kajian Pariwisata menggapai beberapa tujuan sekaligus. Pemilihan tema pariwisata berbasis masyarakat (PBM) Model Bali pada dasarnya menjadi bukti bahwa Magister Kajian Pariwisata Unud mengukuhkan PBM sebagai salah satu bidang kajian unggulan. Harapan lainnya khalayak diharapkan menyadari keberpihakan lembaga pendidikan strata 2 ini pada komunitas lokal yang selama ini cenderung termarginalkan dalam proses pengembangan pariwisata. Artinya, jika masyarakat merasa penyaluran aspirasinya di tempat lain, Magister Kajian Pariwisata dapat menjadi saluran alternatif untuk mengemukakan pendapat.

Sudah tentu suara masyarakat itu akan dikaji dengan konsep atau teori yang relevan dan disampaikan ke pihak berkepentingan (eksekutif, legislatif, atau pihak lain seperti pengusaha). Selanjutnya,

secara tersurat tujuan penulisan buku ini antara lain: menyediakan model acuan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang tepat dalam konteks social budaya masyarakat Bali; memperkaya literatur untuk kajian-kajian PBM yang memang sangat minim; membantu masyarakat/komunitas untuk mendokumentasikan upaya kerasnya dalam menemukan ide-ide pengembangan/perbaikan pengelolaan serta merumuskan implementasi PBM sehingga memberi manfaat secara sosial, ekonomi maupun lingkungan setempat.

Secara ringkas buku ini mendeskripsikan perjuangan masyarakat Bali yang bernaung pada desa adat memperjuangkan hak-haknya untuk terlibat dalam menggali potensi pariwisata di wilayahnya, selanjutnya mengemas, mengelola, mempromosikan sekaligus mengawasi aktivitas pengembangan pariwisata agar memberi manfaat yang lebih banyak bagi penduduk lokal. Manfaat itu bisa dirasakan secara langsung dimana masyarakat menjadi pekerja atau mengelola bisnis yang berkaitan langsung atau tidak langsung (*direct income*), ada juga manfaat tidak langsung seperti masyarakat tak perlu membayar iuran atau *pepeson* ketika ada upacara keagamaan, dan pembangunan di desa adat.

Kajian Isi Buku

Bila dirunut isi buku dari Bab 1 hingga Bab 7, buku setebal 207+XXVII halaman ini memotret perjalanan pengembangan PMB lintas kabupaten dengan beragam potensi atau atraksi pariwisata yang digarap. Diawali dari telaah komplit dan mendalam Ketut Surya Diarta tentang *marine tourism* berbasis masyarakat di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Dosen Prodi Agribisnis FP Unud yang sedang merampungkan studi S3 Pariwisata Unud ini mengupas bagaimana upaya masyarakat Pemuteran yang hidupnya serba kekurangan pada tahun 1980 di mana pendapatannya hanya diperoleh dengan cara beternak sapi, dan menanam jagung atau kacang-kacangan di lahan kering saat musim hujan. Mengatasi kesulitan ini, masyarakat Pemuteran mencari tambahan penghasilan dengan kegiatan merusak alam yakni menangkap ikan dengan bom dan potassium.

Tabir gelap ini terkuat dengan kehadiran seorang socio-entrepreneur I G. A. Prana (Agung Prana) yang datang mengedukasi dan memimpin masyarakat melakukan perubahan awal tahun 1990-an melalui pasyarakat teknologi biorock mengatasi kerusakan

karang setempat. Agung Prana bekerja tidak sendirian karena yang bersangkutan bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan lembaga adat dalam memberdayakan masyarakat setempat agar mau dan mampu berpartisipasi dalam pengembangan marine tourism. Kini pekerjaan berat dan perjuangan panjang itu telah membuahkan hasil, Desa Pemuteran jadi destinasi *marine tourism* paling diminati di Provinsi Bali, dari tahun ke tahun semakin banyak wisatawan menikmati pemandangan bawah laut dengan atraksi terumbu karang buatan.

Dari Kabupaten Buleleng bergeser ke arah Selatan, pembaca akan menyimak kajian I Putu Krisna Arta Widana tentang perjuangan warga Desa Adat Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan untuk bisa terlibat dalam mengelola Daerah Tujuan Wisata (DTW) Tanah Lot. Tulisan ini mendeskripsikan kegigihan krama Desa Adat Beraban untuk mendapatkan hak mengelola potensi wisata di wilayahnya. Dalam paparan alumnus Magister Kajian Pariwisata ini akan ditemukenali bagaimana posisi Desa Adat Beraban “from zero to hero” dalam upaya mendistribusikan manfaat pengembangan pariwisata di wilayahnya kepada masyarakat setempat. Antara tahun 1980-2000, Desa Adat Beraban tidak terlibat dalam pengelolaan DTW Tanah Lot, maka warga setempat tidak mendapat apa-apa, antara tahun 2000 hingga 2011 pengelolaan DTW Tanah Lot melibatkan tiga pihak (swasta, Pemkab Tabanan, dan Desa Adat Beraban) dan Desa Adat Beraban dapat bagian pendapatan 20%.

Sejak tahun 2012 hanya Pemkab Tabanan dan Desa Adat Beraban yang mengelola DTW Tanah Lot, Desa Adat berhak atas bagian pendapatan 24%. Kendati peningkatan persentase hanya 4 %, namun Desa Adat Beraban dapat berkontribusi pembagian manfaat pariwisata kepada masyarakat di luar Desa Adat Beraban di wilayah Kecamatan Kediri dengan rincian bagian pendapatan ke Pura Tanah Lot (7,5 %), Pura Sekitar (4 %), Desa Adat se-Kecamatan Kediri (6,5 %). Sementara 58 % pendapatan DTW Tanah Lot di setor sebagai pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tabanan. Pendistribusian pendapatan pariwisata ke sebagian besar warga Kecamatan Kediri tidak mungkin terjadi, jika tidak didahului perjuangan tanpa mengenal lelah Desa Adat Beraban.

Perjuangan serupa dilakukan masyarakat di Desa Adat Kedonganan dalam mengelola kafe yang sesuai dengan daya dukung sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan setempat. Kolaborasi apik

Anom Hery Suasapha dan Syamsul Alam Paturusi membedah bagaimana krama Desa Adat Kedonganan yang semula merasa terganggu atas menjamurnya kafe-kafe menjual menu ikan bakar di kawasan Pantai Kedonganan yang berjumlah 76 kafe. Jumlah ini dinilai melebihi kapasitas daya dukung pantai, sehingga mengganggu pelaksanaan kegiatan keagamaan di pantai seperti *melasti* dan kenyamanan wisatawan dan penduduk lokal menikmati waktu luang. Berdasarkan kajian pemuka adat setempat, jumlah kafe yang berdiri di Pantai Kedonganan hanya 12 kafe, namun demi pengelolaan secara adil untuk seluruh banjar yang ada maka disepakati 24 kafe yang didirikan dan di kelola masing-masing banjar di lingkungan Desa Adat Kedonganan.

Sementara itu, Fatrisia Yulianie dan Widiastuti memotret “kebangkitan” kesadaran masyarakat di Desa Tegallalang, dan Desa Kedisan dalam mengelola Daya Tarik Wisata Ceking. Setelah bertahun-tahun DTW ini seolah tak bertuan karena pengelolaan dan penataan kawasannya tidak ada yang memandu secara jelas dan rinci. Akibatnya, DTW ini acapkali dikeluhkan karena kumuh dan menjadi biang kemacetan jalur wisata Ubud-Kintamani atau sebaliknya. Terbentuknya Badan pengelola Objek Wisata Ceking (BPOWC) mulai tahun 2011 menjadi langkah awal optimalisasi potensi DTW Ceking untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Sejalan dengan ini I Ketut Sardiana dan Ni Luh Ramaswati Purnawan meneropong dari dekat kisah sukses PBM di Desa Tenganan Dauh Tukad, Karangasem. Setelah sukses mengemas atraksi pariwisata budaya, desa adat setempat mengembangkan diversifikasi wisata ekologi dengan harapan semakin banyak masyarakat bisa terlibat langsung untuk mengais rejeki dari aktivitas pariwisata di desanya.

Dua tulisan lainnya tentang PBM dicuatkan dari “kaki indah” Pulau Bali yakni di Desa Kutuh dan Desa Pecatu. I Nyoman Tingkat dan I Nyoman Darma Putra menyajikan multifungsionalitas Pantai Penyekjekan yang di balik nama menjadi Pantai Pendawa pada tahun 2012. Pembukaan akses dengan memotong tebing kapur selama 12 tahun menjadi alasan kuat menamai pantai tersebut dengan sebutan Pantai Pandawa. Pantai ini pun memiliki beberapa fungsi yakni menjadi areal produksi rumput laut, tempat melaksanakan upacara keagamaan dan saat ini menjadi destinasi wisata unggulan. Sebagai destinasi pariwisata baru, sudah tentu membawa peluang kerja dan peluang bisnis baru bagi masyarakat lokal dan secara perlahan mereka

dapat menggapai kualitas hidup yang lebih baik.

Desa Adat Pecatu, yang menjadi fokus studi kasus PBM I Ketut Yudasuara boleh jadi paling beruntung karena memiliki sejumlah destinasi pariwisata. Berpijak pada Peraturan Bupati Badung No. 07 Tahun 2005 tentang Objek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Badung sebanyak 33 lokasi, lima diantaranya ada di Desa Pecatu, yakni Kawasan Luar Pura Uluwatu, Pantai Suluban, Pantai Padang-Padang, Pantai Labuhan Sait, dan Pantai Nyang Nyang. Ditambahkan, ada dua pantai yang tidak dicantumkan sebagai ODTW, namun diminat wisatawan, yakni Pantai Bingin dan Pantai Dream Land.

Mencermati karakteristik pengeolaan PBM di masing-masing desa adat tersebut, PBM di Desa Adat Pecatu tergolong “istimewa”. Jika lembaga adat yang lainnya menemukan sendiri potensi-potensi alam, sosial budaya, maupun ekonomi yang dapat dipoles sebagai destinasi pariwisata namun Desa Adat Pecatu seakan ketiban durian runtuh. Destinasi wisata langsung ada dihadapannya untuk dikelola, dan tidak hanya satu destinasi wisata. Kondisi ini menjadikan gaung PBM di Pecatu sedikit redup dibandingkan kawasan lain. Mengutip pendapat Tasci *et al.* pada tulisan Suasapha dan Paturusi (2015: 61) pada buku tersebut menegaskan bahwa PBM mestinya berproses secara *bottom up*, jadi gaungnya akan lebih menggema ditengah masyarakat. Hal tersebut dimungkinkan mengingat ada usaha yang lebih keras dari masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya, setelah hak tersebut diraih ada upaya lebih baik dalam memanfaatkan potensi pendapatan pariwisata secara optimal. Berbagai rintangan baik penyediaan SDM, mekasnisme pengelolaan dan rencana pengembangan lainnya tersusun dengan baik. Sejujurnya, roh PBM semacam ini tidak akan dapat dipelajari dari kisah pengelolaan PBM Pecatu. Sebaliknya, pengelola setempat cenderung pasrah dan mengeluh tidak mampu mengatasi tantangan PBM misalnya keterbatasan sumber daya manusia pariwisata. Pernyataan ini menjadi tidak elok dalam upaya menumbuhkan daya saing PBM di tengah kuatnya persaingan manajemen pariwisata. Jika Pengelola PBM Pecatu saja kekurangan SDM Pariwisata yang wilayahnya dikelilingi lembaga pendidikan pariwisata mumpuni, seperti STP Nusa Dua, Politeknik Negeri Bali, dan Universitas Udayana, bagaimana dengan PBM di pedalaman Pulau Bali seperti di Kabupaten Bangli, Karangasem, Buleleng atau Jembrana yang jauh dari pusat pendidikan pariwisata di Bali Selatan? Jika demikian, adakah pelajaran positif dari PBM Pecatu? Jawabnya

tentu akan pembaca temukan setelah membaca buku itu secara seksama.

Sederhana Mudah Dimengerti

Secara teknis penulisan buku ini sangat menarik, karena ditulis penulis-penulis berpengalaman yang mampu menceritakan materi ilmiah dengan sangat sederhana dan mudah dimengerti oleh orang awam. Kondisi ini dimungkinkan karena sang editor yang seorang akademikus juga seorang jurnalis senior yang secara periodik menularkan kemampuan menulis kepada wartawan-wartawan muda. Keberagaman isi, dan latar belakang penulis memberi jaminan isi buku ini sangat kaya dan penuh manfaat untuk memahami proses pembangunan pariwisata di Bali dari sudut pandang kerakyatan di Bali.

Kendati demikian, ketidaksempurnaan dalam meramu isi buku ini tetap saja mudah dikenali, salah satunya buku ini minim prolog dan epilog yang memberikan gambaran seperti apakah PBM Model Bali yang dimaksud? Apa pijakan teori atau konsep mendeskripsikan PBM Model Bali tersebut? Apa ciri khas PBM Bali itu? Mungkinkah PBM model Bali diterapkan di daerah lain? Tulisan epilog juga perlukan untuk memberikan simpulan kepada pembaca soal PBM Model Bali yang seharusnya dikembangkan, dan memberikan gambaran ke depan bagaimana pengelolaan PBM Model Bali dikembangkan sesuai perkembangan jaman.

Secara fisik buku yang dicetak 20,5 x 14 cm dengan penjilidan yang kuat ini kaya dengan ilustrasi untuk memperkaya penggambaran isi buku. Ilustrasi-ilustrasi tersebut menjadikan paparan isi buku lebih sempurna. Hanya saja ketika dicermati ilustrasi cover buku sedikit tidak nyambung, dimana cover tersebut menonjolkan kegiatan karma desa pakraman sedang melakukan kegiatan *melasti* dengan latar belakang terassering sawah. Secara kasat mata ilustrasi ini tidak menggambarkan keterlibatan desa adat dalam mengelola destinasi wisata. Boleh jadi pemilihan cover ini yang tidak menggambarkan isi buku ini sebagai bukti perencanaan penerbitan buku ini kurang matang. Terlepas dari “gap” cover dan isi buku, foto cover buku itu memunculkan rasa damai dan nyaman sehingga sekali lirik foto ini pembaca akan tergerak hatinya memiliki buku ini.

Tulisan *Pariwisata Berbasis Masyarakat Model Bali* sudah pasti menuntun rasa penasaran pembaca untuk menyelami isi buku

yang tentu menyimpan banyak informasi dan kajian. Jadi, tidak rugi membeli buku ini, karena Anda akan menyingkap fenomena bangkitnya masyarakat desa secara institusional mengelola dan menikmati pembangunan pariwisata Bali yang selama ini lebih banyak dinikmati penguasa dan pengusaha.